



RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pencerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Tahun

2025 serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

- (1) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Renja Perangkat Daerah memuat kegiatan dan sub kegiatan yang mempedomani pada Renstra Perangkat Daerah dalam RPJMD.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

- Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada:
- a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Lampung dan program prioritas nasional dalam RKP;
 - b. evaluasi capaian kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - c. visi, misi dan program Wali Kota.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENUTUP

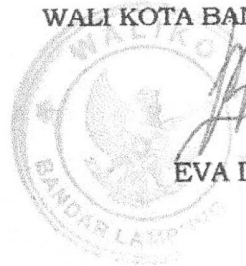
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

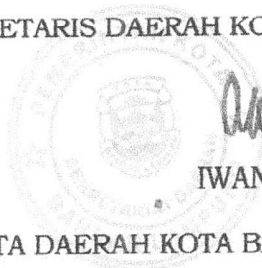
Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,


EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 35

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

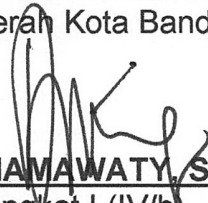
No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	✓			
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	✓			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	✓			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	✓			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	✓			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	✓			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓			
			✓			
5	BAB V	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung,


Desti Mega Putri, Sp., MT.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196912021995032002

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

Diverifikasi 23 Juli 2024		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Fungsional Perencana Ahli Muda	



DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			

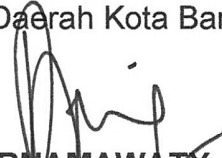
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	


Bandar Lampung, Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung,


Desti Mega Putri, Sp., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912021995032002



Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung



DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

Diverifikasi : 23 Juli 2024		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Fungsional Perencana Ahli Muda	

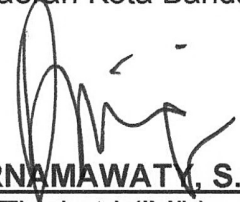
FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	Telah Sesuai.
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah sesuai.

23 Juli 2024

Diverifikasi : Tanggal	Tanda Tangan
1 Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
Plt. Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia	
2 Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
Fungsional Perencana Madya	

Bandar Lampung, 23 Juli 2024,
 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung


DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP.19700218 199303 2 002

LAMPIRAN 2
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala

kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-1 (satu) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***Meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
19. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2024.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini menyajikan Dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Kinerja Sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selama tahun 2023 , serta perkiraan target tahun 2024. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Untuk capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	MISI/ SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN RENSTRA OPD	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2023	Target dan Capaian Tahun 2023	
							Realisasi	Capaian
								%
1	MISI 1	Meningkatnya Derajat		Usia Harapan Hidup (AHH)	absolut	71,89	71,91	100,03
	Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat	Kasus Kematian Ibu (AKI)	kasus	10	5	150
	SASARAN 1			Kasus Kematian Bayi (AKB)	kasus	60	91	48,33
	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju penduduk			Balita Stunting	persen	16	13,4	116,25
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	persen	50	30
				Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	Persen	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

Indikator 1 : Kasus Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Maternal tergambar kan dari besarnya kasus Kematian Ibu (AKI) melahirkan. Pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kota Bandar

Lampung berjumlah 10 kasus (2 per 100.000 kelahiran hidup). Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 15 kasus (3 per 100.000 kelahiran hidup). Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian ibu melahirkan menurun tajam menjadi 4 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian ibu sebanyak 5 kasus. Perbandingan antara realisasi di tahun 2023 sebanyak 5 kasus dari target sebanyak 10 Kasus, sehingga capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 150%. Capaian Kinerja 150% ini dapat diinterpretasikan bahwa kasus kematian Ibu di Kota Bandar Lampung dapat dikendalikan dengan baik karena realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan .

Indikator 2 : Kasus Kematian Bayi (AKB)

Pada tahun 2020 Kasus kematian bayi di Kota Bandar Lampung berjumlah 34. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu melahirkan naik menjadi 60 kasus. Untuk tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi kembali meningkat menjadi 69 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi sebanyak 91 kasus. Jika di bandingkan antara realisasi dan target di hasilkan capaian kinerja 48,33%. Kondisi ini menggambarkan kinerja masih di bawah 100% karena belum bias mengendalikan kasus kematian bayi. Capaian kinerja di tahun berikutnya diharapkan bias mencapai 100 % dengan realisasi kasus kematian bayi di bawah target yang ditetapkan. Penyebab kematian ini sebagian disebabkan karena berat bayi lahir rendah (BBLR), selebihnya dikarenakan asfiksia (gangguan nafas), kelainan bawaan dan penyakit infeksi. Kondisi kesehatan ibu saat kehamilan sangat menentukan kesehatan bayinya pada saat di lahirkan, untuk itu berbagai upaya diarahkan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil resiko tinggi (kekurangan energi protein kronis/KEK)

Indikator 3 : Kasus Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bias disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek dari pada standar usianya. Pada Tahun 2023 dilakukan survey kesehatan Indonesia oleh Kementerian Kesehatan secara serentak di Indonesia. SKI ini dilaksanakan dalam periode 5 tahunan. Hasil SKI ini menjadi dasar dalam penentuan kebijakan. Tahun 2023 hasil SKI menunjukkan jumlah kasus stunting di Kota Bandar Lampung sebesar 13,4%. Realisasi kasus stunting ini jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 16 % terdapat capaian kinerja 116,25%. Capaian kinerja yang baik diatas 100% menunjukkan upaya keberhasilan dalam pengendalian kasus balita stunting di Kota Bandar Lampung.

Sasaran II: Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan

Indikator 1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengakuan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Proses akreditasi ini dievaluasi setiap 3 tahun sekali untuk menjamin kualitas pelayanannya. Pada tahun 2023 di targetkan 50% fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna, realisasisebesar 30% sehingga capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 60%. Masih terdapat kesenjangan capaian kinerja sebesar 40% yang perlu terus diupayakan peningkatan kinerjanya hingga realisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi mencapai 50%. Perbaikan sarana, prasarana sumber daya manusia, pencatatan pelaporan dan aspek lain untuk proses penilaian akreditasi. Akreditasi ini merupakan hal baru yang memang harus dipahami oleh fasilitas pelayanan kesehatan

sebagai standar mutu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator2 : Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Survei kepuasan seharusnya dilaksanakan sekali setahun oleh penyelenggara pelayanan public sebagai informasi dasar untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan. Survei kepuasan diatur secara teknis pelaksanaan survey tersebut kedalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 16/2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Permenpan-RB No. 16/2014 kemudian disempurnakan melalui Permenpan-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Realisasi Survei Kepuasan Masyarakat menggambarkan berapa banyak Puskesmas yang mendapatkan penilaian BAIK (nilai 76,61-88,30) di tahun 2023. Dari 31 Puskesmas yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di tahun 2023, rata-rata mendapatkan nilai BAIK (100%), hal ini menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan.

kesehatan di Puskesmas, capaian kinerja 100%. Hal ini berkorelasi dengan kondisi 31 Puskesmas telah melaksanakan proses akreditasi di tahun 2016.

Dapat pula dijelaskan terkait pelaksanaan program AIDS.TBC dan Malaria di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Penanggulangan masalah Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV AIDS) di Indonesia adalah salah satu masalah kesehatan nasional yang memerlukan penanganan bersama secara komprehensif. Sejak 10 tahun terakhir, jumlah kasus AIDS di Indonesia mengalami lonjakan yang bermakna. Hal ini menuntut perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus HIV. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal satu kali dalam setahun yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Kota Bandar Lampung mempunyai 51 Fasilitas Kesehatan yang sudah melaksanakan layanan HIV secara komprehensif yaitu mampu melakukan test HIV dan pengobatan HIV secara mandiri, terdiri dari 31 Puskesmas, 4 RS Pemerintah, 7 RS Swasta, 5 RSIA dan 4 Klinik Kesehatan. Selain di fasilitas kesehatan, untuk mempermudah akses Layanan HIV pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pemerintah juga menyediakan Layanan Tes HIV di Lapas dan Rutan. Upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai standar yaitu dengan memberikan orientasi pada seluruh petugas yang memberikan Layanan HIV. Petugas yang dilatih terdiri dari dokter, perawat atau bidan, petugas laboratorium, petugas farmasi dan petugas pencatatan dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian HIV Dinas Kesehatan juga dibantu oleh Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) yang focus dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV. Hasil kinerja Layanan HIV Kota Bandar Lampung sampai Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Capaian target SPM tahun 2022 adalah 26.870 (96%) dari target 28.060 orang populasi berisiko terinfeksi HIV sedangkan pada tahun 2023 capaian target SPM di Bandar Lampung tercapai 34.554 (100 %) dari jumlah target 31.996 orang populasi berisiko terinfeksi HIV. Rincian data populasi berisiko yang diskriming HIV pada tahun 2023 terdiri dari

Ibu Hamil 19.367 (positif HIV 7 orang) , Pasien TBC 2.913 ((positif HIV 29 orang) , Pasien IMS 1.683 (positif HIV 4 orang),
Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) 2.276 (tidak ditemukan positif),Wanita Penjaja Seks (WPS) 2.937 (Positif HIV 9 orang),
Lelaki Seks Lelaki (LSL) 2.473 (Positif HIV 194 orang) dan Transgender/ Waria 347 (positif HIV 0 orang) , Pelanggan Pekerja seks 110 (positif HIV 29 orang), Pasangan kelompok risiko tinggi 209 (positif HIV 25 orang) dan kelompok lain di tes HIV 2.240 (positif HIV 41 orang)

2. Pencegahan dan Penanggulangan masalah TBC. Dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan untuk tercapainya visi Kota Bandar Lampung yaitu “Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan”, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan berbagai program Kesehatan dengan leading sector yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang salah satunya adalah program Tuberkulosis (TBC) yang ada di naungan Bidang Pencegahan dan Penyakit Menular. Penyakit menular seperti penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian walaupun upaya penanggulangan TBC telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. Selain itu Tuberkulosis adalah salah satu program yang masuk kedalam penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggung jawab prioritas Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Global TBC Report WHO 2023, Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua setelah India. Saat ini Indonesia termasuk satu dari delapan negara yang menyumbang 2/3 kasus TBC di dunia. Pada tahun 2023, diestimasikan terdapat 1.060.000 orang jatuh sakit dan 187.000 jiwa meninggal akibat TBC. Dari estimasi tersebut, pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 821.200 kasus atau sekitar 77 %. Bila dilihat

dari Tingkat Kabupaten/Kota , penyumbang terbesar jumlah terduga TBC adalah Kota Bandar Lampung dengan total temuan terduga sebesar 34.969 atau sebesar 21,1% dari total terduga Provinsi Lampung. Sementara untuk temuan kasus TBC , Kota Bandar Lampung juga menjadi penyumbang terbesar kasus TBC dengan jumlah kasus TBC sebesar 5.444 atau 27,9% dari jumlah kasus TBC di Provinsi Lampung.

Jika dilihat dari indicator penemuan kasus TBC, Kinerja Kota Bandar Lampung di tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Cakupan Penemuan Kasus TBC di Tahun 2022 sebesar 79,48% dengan angka absolut 5.213 kasus. Di tahun 2023 naik menjadi 84,94% dengan angka absolut menjadi 5.425 kasus. Hal ini menjadi rapor baik bagi Kota Bandar Lampung. Selanjutnya bila dilihat dari indicator keberhasilan pengobatan TBC , cakupan Kota Bandar Lampung di tahun 2023 juga meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2022 , cakupan keberhasilan pengobatan TBC di angka 96,50% (target:90%) sementara di tahun 2023 meningkat menjadi 97,27% (target:90%). Hal ini juga menjadi hal yang patut dibanggakan dari Kinerja TBC di Kota Bandar Lampung.

3. Pencegahan dan Penanggulangan masalah Malaria

Dalam peringatan Hari Malaria Nasional, yang di selenggarakan Kementerian kesehatan RI Tahun 2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Sertifikat eliminasi malaria ini diberikan setelah Kota Bandar Lampung memenuhi 3 persyaratan indikator dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yaitu : angka positif rate kasus malaria di bawah lima persen, tingkat kejadian kasus malaria 1:1000 kasus dan selama tiga tahun berturut-turut tidak ada kejadian malaria yang diakibatkan nyamuk local (tidak di temukan kasus Indigenous). Berikut ditampilkan trend kasus malaria di Kota Bandar Lampung dari Tahun 2017- 2023.

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	829
2	2018	733
3	2019	463
4	2020	80
5	2021	146
6	2022	250
7	2023	218

2.2 Analisis Kinerja PelayananOPD

Realisasi Anggaran per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

1. RINGKASAN REALISASI TAPKIN DAN PENDANAAN

Berikut ditampilkan table realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.282.762.430	166.180.988.122	96,46	172.104.743.503	166.180.988.122	96,56	178.018.927	-	0
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	16.968.993	67,88	25.000.000	16.968.993	67,88	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	16.968.993	67,88	25.000.000	16.968.993	67,88	-	-	0
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.858.032.030	79.681.654.777	98,55	80.858.032.030	79.681.654.777	98,55	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.642.032.030	79.527.366.127	98,62	80.642.032.030	79.527.366.127	98,62	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.000.000	154.288.650	71,43	216.000.000	154.288.650	71,43	-	-	0
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	4.500.000		25.000.000	4.500.000				
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	4.500.000		25.000.000	4.500.000				
	Kegiatan : Administrasi Umum	277.560.763	233.596.032	84,16	277.560.763		84,16			0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Perangkat Daerah					233.596.032		-	-	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000	19.996.000	99,98	20.000.000	19.996.000	99,98	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	45.325.500	90,65	50.000.000	45.325.500	90,65	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.060.763	11.688.763	96,92	12.060.763	11.688.763	96,92	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.101.500	97,01	30.000.000	29.101.500	97,01	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	48.905.000	97,81	50.000.000	48.905.000	97,81	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000	7.500.000	100,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Fasilitas iKunjungan Tamu	8.000.000	7.210.000	90,13	8.000.000	7.210.000	90,13	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	63.869.269	63,87	100.000.000	63.869.269	63,87	-	-	0
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.018.927	77.850.000		-	77.850.000	0,00	178.018.927	77.850.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	100.000.000	0			0	0,00	100.000.000	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan	78.018.927	77.850.000				0,00			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	MesinLainnya					77.850.000		78.018.927	77.850.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.467.084.000	21.258.404.910	90,59	23.467.084.000	21.258.404.910	90,59	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikas iSumber Daya Air dan Listrik	188.000.000	170.620.910	90,76	188.000.000	170.620.910	90,76	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.279.084.000	21.087.784.000	90,59	23.279.084.000	21.087.784.000	90,59	-	-	0
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	755.220.710	372.207.975	49,28	755.220.710	372.207.975	49,28	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	28.800.000	96,00	30.000.000	28.800.000	96,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.220.710	280.788.475	54,50	515.220.710	280.788.475	54,50	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	5.870.000	58,70	10.000.000	5.870.000	58,70	-		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	49.709.500	33,14	150.000.000	49.709.500	33,14	-		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	7.040.000	14,08	50.000.000	7.040.000	14,08	-		
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	-		
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	-	-	0
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.441.169.061	88.039.026.743	49,62	166.249.206.326	78.536.806.113	47,24	11.191.962.735	9.502.220.630	84,90
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	18.881.569.830	17.002.523.545	90,05	7.906.367.095	7.717.062.915	97,61	10.975.202.735	9.285.460.630	84,60
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.841.850.000	2.443.907.030	63,61				3.841.850.000	2.443.907.030	63,61
	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	1.606.290.000	1.377.250.000	85,74				1.606.290.000	1.377.250.000	85,74
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.527.062.735	5.464.303.600	98,86			0,00	5.527.062.735	5.464.303.600	98,86
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin	5.877.266.559	5.688.051.879	96,78	5.877.266.559	5.688.051.879	96,78			0
	Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.029.100.536	2.029.011.036	100,00	2.029.100.536	2.029.011.036	100,00			0
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	158.528.041.097	71.027.688.198	44,80	158.311.281.097	70.810.928.198	44,73	216.760.000	216.760.000	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	UKP									
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	429.898.056	102.898.000	23,94	429.898.056	102.898.000	23,94	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	172.422.000	138.483.000	80,32	172.422.000	138.483.000	80,32	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	206.640.000	161.988.000	78,39	206.640.000	161.988.000				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	223.290.000	211.875.000	94,89	223.290.000	211.875.000	94,89	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	309.884.000	152.225.000	49,12	309.884.000	152.225.000	49,12			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.130.978.466	1.772.920.000	83,20	2.130.978.466	1.772.920.000	83,20	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.168.000	57.973.000	86,31	67.168.000	57.973.000				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.419.566.000	1.414.736.964	99,66	1.419.566.000	1.414.736.964	99,66	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	1.074.539.200	1.053.432.768	98,04	1.074.539.200	1.053.432.768	98,04	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	109.487.600	107.446.000	98,16	109.487.600	107.446.000	98,16			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.694.065.000	-	0,00	2.694.065.000	-	0,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan ResikoTerinfeksi HIV	300.000.000	263.500.000	87,83	300.000.000	263.500.000	87,83	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	953.995.000	818.322.000	85,78	930.595.000	818.322.000	87,94	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.056.000	295.268.000	87,60	337.056.000	295.268.000	87,60	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	-		50.000.000	-				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	849.454.000	488.464.000	57,50	849.454.000	488.464.000	57,50	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	372.860.000	307.905.160	82,58	372.860.000	307.905.160	82,58	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	196.000.000	135.960.000	69,37	196.000.000	135.960.000	69,37	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00			
0	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.400.000	11.400.000	100,00	11.400.000	11.400.000	100,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	107.902.211.281	41.020.221.657	38,02	107.902.211.281	41.020.221.657	38,02	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	216.760.000	216.760.000	100,00				216.760.000	216.760.000	
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas	18.807.971.825	13.238.146.255	70,39	18.807.971.825	13.238.146.255	70,39	-	-	0
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.417.591.425	8.348.590.000	45,33	18.417.591.425	8.348.590.000	45,33	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	308.064.169	252.879.799	82,09	308.064.169	252.879.799	82,09			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	189.868.575	-	0	213.268.575	-	0			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	100.000.000	18.000.000	18	100.000.000	18.000.000	18			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000	96.740.000	96,74	100.000.000	96.740.000	96,74			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	476.870.500	314.553.595	65,96	476.870.500	314.553.595	65,96			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	31.558.134	8.815.000	27,93	31.558.134	8.815.000	27,93	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31.558.134	8.815.000	27,93	31.558.134	8.815.000	27,93	-	-	0
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	232.450.275	32.916.000	14,16	232.450.275	32.916.000	14,16	-	-	0
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya	100.000.000	0	0,00	100.000.000	0	0,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	100.000.000	0	0,00	100.000.000	0	0,00	-	-	0
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	132.450.275	32.916.000	24,85	132.450.275	32.916.000	24,85	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.450.275	32.916.000	24,85	132.450.275	32.916.000	24,85	-	-	0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	203.330.000	161.742.000	79,55	203.330.000	161.742.000	79,55	-	-	0
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0,00			0,00	-	-	0
	Kegiatan : Penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri RumahTangga	153.350.000	111.762.000	72,88	153.350.000	111.762.000	72,88	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	153.350.000	111.762.000	72,88	153.350.000	111.762.000	72,88	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	49.980.000	49.980.000	100,00	49.980.000	49.980.000	100,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	49.980.000	49.980.000	100,00	49.980.000	49.980.000	100,00	-	-	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	596.825.000	494.929.000	82,93	596.825.000	494.929.000	82,93	-	-	0
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	412.500.000	395.204.000	95,81	412.500.000	395.204.000	95,81	-	-	0
	Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	412.500.000	395.204.000	95,81	412.500.000	395.204.000	95,81	-	-	0
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	184.325.000	99.725.000	54,10	184.325.000	99.725.000	54,10	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	184.325.000	99.725.000	54,10	184.325.000	99.725.000	54,10	-	-	0
Jumlah Belanja Operasi		339.386.555.104			339.386.555.104		72,31			
Jumlah Belanja Modal		11.369.981.662						11.369.981.662	9.502.220.630	83,57
Jumlah Belanja Tidak Terduga										
Jumlah Belanja Transfer										
Total		350.756.536.766	254.909.601.865	72,67	339.386.555.104	245.407.381.235	72,31	11.369.981.662	9.502.220.630	83,57

2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023, dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023, berdasarkan indikator sasaran dan target, dialokasikan sebesar Rp 350.756.536.766 dengan realisasi sebesar Rp 254.909.601.865 (72,67%). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 5 program, 18 kegiatan, dan 65 sub-kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub-kegiatan merupakan program pendukung bagi terlaksananya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan. Untuk itu, yang akan dikupas lebih mendalam adalah pelaksanaan 4 (empat) program lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 36 sub-kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 177.441.169.061. Output kinerja dari program ini mencakup angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup sebesar 10 kasus, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 6,50 persen, tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak 231 kasus, dan cakupan pelayanan BLUD 100 persen. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp 88.039.026.743 (49,62%). Secara rinci, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 18.881.569.830 dan realisasi anggaran Rp. 17.002.523.545 (90,05%). Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.1.1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Alokasi anggaran pada Sub kegiatan ini diperuntukan untuk rehab bangunan Instalasi Farmasi (IFK) Kesehatan Dinas Kesehatan

yang kondisinya sudah tidak lagi maksimal dalam melaksanakan fungsinya dalam melakukan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan Kesehatan lainnya.

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.841.850.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Anggaran ini telah terealisasi 63,61 persen atau sebesar Rp. 2.443.907.030 dengan realisasi fisik 100 persen. Saat ini bangunan telah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.1.2. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.606.290.000 yang diperoleh dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar Rp.1.500.000.00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan sebesar Rp. 106.290.000. Output kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan jenazah sebanyak 5 unit dan perlengkapan penunjang instalasi farmasi. Keberadaan kendaraan jenazah ini merupakan salah satu kegiatan prioritas dari Wali Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas kendaraan jenazah ini secara gratis. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.377.250.000 atau sebesar 85,75 persen

1.1.3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp 5.527.062.735, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan Tahun 2023. Realisasi anggaran mencapai Rp 5.464.303.600 atau sebesar 98,86%. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan sesuai standar. Rincian penggunaan anggaran tersebut meliputi pembayaran untuk pembelian alat kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp

2.005.752.735 dengan realisasi 100%. Dan untuk pembayaran kegiatan pembelian alat Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 3,521,310,000 dan baru terealisasi sebesar Rp. 3.458.550.865 (98,21%)

1.1.4. Pengadaan obat, vaksin

Dukungan anggaran sebesar Rp 5.877.266.559 bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan obat dari dana DAK; alokasi dari DAK hanya untuk kegiatan penyusunan kebutuhan obat. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan obat untuk pelayanan dasar di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran mencapai Rp 5.688.051.879 (96,78%), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembayaran kegiatan pengadaan obat DAK tahun 2022 sebesar Rp. 2,843,103,559 (realisasi 100%)
- b) Pengadaan obat tahun 2023 bersumber anggaran APBD 2023 Rp. 3.000.000.000, anggaran terealisasi 100 persen.

1.1.5. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Dukungan anggaran sebesar Rp.2.029.100.536 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan Bahan Habis Pakai di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.029.011.036 (100%).
Dengn rincian :

- a) Pembayaran kegiatan pengadaan obat tahun 2022 sebesar Rp. 1.029.011.036 (realisasi 100%)
- b) Pengadaan Bahan Habis Pakai tahun 2023 bersumber anggaran APBD 2023 Rp. 1.000.000.000, anggaran terealisasi 100 persen.

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP didukung oleh anggaran sebesar Rp 158.528.041.097, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.027.688.198 atau 44,80%. Kegiatan ini terdiri dari 30 sub-kegiatan, yang sebagian besar merupakan anggaran untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan Tahun 2023. Sebagian besar dana untuk kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023. Sub-kegiatan tersebut meliputi:

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp 429.898.056 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai mencakup cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan konsumsi tablet FE pada ibu hamil, dan tersedianya media penyuluhan untuk ibu hamil. Realisasi anggaran dari sub-kegiatan ini mencapai Rp 102.898.000 atau 23,94%, dengan realisasi pekerjaan terlaksana 100 persen.

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 172.422.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya derajat Kesehatan ibu bersalin dan terkendalinya kasus kematian baik ibu maupun bayi. Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan ibu bersalin. Realisasinya anggaran sebesar Rp. 138.483.000 (80,32%). Realisasi fisik kegiatan 100 persen dilaksanakan.

1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi barulahir

Dukungan anggaran sebesar Rp.206.640.000 sumber anggaran berasal dari DAK bidang Kesehatan tahun 2023. Output kinerja

yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi baru lahir. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.988.000 (78,39%).

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Dukungan anggaran sebesar Rp.223.290.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi dan balita. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp.211.875.000 (94,89%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Dukungan anggaran sebesar Rp 309.884.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan Tahun 2023. Output kinerja yang ingin dicapai adalah pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk penjangkaran dan pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar secara berkala. Realisasi anggaran mencapai Rp 152.225.000 atau 49,12%, dengan realisasi pekerjaan terlaksana 100 persen.

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Dukungan anggaran sebesar Rp 2.130.978.466 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah deteksi dini terhadap kanker serviks (kanker leher rahim), terutama pada wanita usia produktif. Upaya ini dilakukan dengan penyediaan bahan-bahan untuk pemeriksaan kanker serviks, diharapkan dapat mengendalikan dan mencegah penyakit tersebut. Realisasi anggaran dari sub-kegiatan ini mencapai Rp 1.772.920.000 atau 83,20%, dengan pelaksanaan kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.

Dukungan anggaran sebesar Rp.67.168.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya orientasi penggunaan panduan prakti suntuk

caregiver informal pada perawatan jangka Panjang bagi lansia untuk tenaga kesehatan di Puskesmas. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp.57.973.000 (86,31%) dengan realisasi kegiatan 100 persen terlaksana.

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Dukungan anggaran sebesar Rp.1.419.566.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah penyediaan bahan-bahan untuk pelaksanaan deteksi dini dan monitoring kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) terutama untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.414.736.964 (99,66%).

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes.

Dukungan anggaran sebesar Rp.1.074.539.200 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah upaya deteksi dini penyakit Diabetes Mellitus. Upaya deteksi ini bertujuan untuk menemukan kasus penyakit diabetes di masyarakat, dengan penemuan dini penyakit maka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.053.432.768 (98,04%).

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Dukungan anggaran sebesar Rp.109.487.600 sumber anggaran DAK bidang Kesehatan Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi dalam bentuk Pertemuan Sosialisasi Kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan dan keluarga penderita gangguan jiwa yang ada di Puskesmas. Kegiatan terlaksana 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 107.446.000 (98,16%)

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

Dukungan anggaran sebesar Rp 2.130.978.466 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah deteksi dini terhadap kanker serviks (kanker leher rahim), terutama pada wanita usia produktif. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan bahan-bahan untuk pemeriksaan kanker serviks, dengan harapan dapat mengendalikan dan mencegah penyakit tersebut. Realisasi anggaran dari sub-kegiatan ini mencapai Rp 1.772.920.000 atau 83,20%, dengan pelaksanaan kegiatan terlaksana 100 persen..

1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Dukungan anggaran sebesar Rp.300.000.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Sama halnya dengan alokasi anggaran pada sub kegiatan sebelumnya, output kinerja yang ingin dicapai adalah deteksi dini orang dengan resiko penyakit HIV. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini Rp.263.500.000 (87,83%), realisasi kegiatan 100 persen.

1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). Dukungan anggaran sebesar Rp. 87.710.500 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas petugas pengelola data kegiatan survei. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.767.450 (98,92%) dengan realisasi kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 953.995.000 sumber dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang diperuntukan bagi operasional pelayanan ambulan gratis diantara untuk penyediaan bahan bakar, insentif sopir, servis kendaraan

ambulan, pengisian tabung oksigen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 818.322.000 (85,78%). Berikut data masyarakat yang menggunakan fasilitas ambulan gratis tahun 2023

Tahun	Pasiensakit	Jenazah	Melahirkan	Lakalantas	Jumlah
2017	4.258	234	143	1463	6.098
2018	4.873	144	123	1653	6.793
2019	6.038	113	135	1678	7.964
2020	4.952	105	75	1916	7.048
2021	3.667	61	34	1998	5.760
2022	3.795	48	20	1570	5.433
2023	3.388	41	3	1337	4.769

1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 337.056.000, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan Tahun 2023. Penggunaan anggaran dari sub-kegiatan ini diperuntukkan bagi beberapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting. Kegiatan ini meliputi penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Realisasi anggaran mencapai Rp 295.268.000 atau 87,60%.

1.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000 Alokasi anggaran ini berasal dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Diperuntukkan bagi kegiatan terkait Kesehatan olahraga di tahun 2023, berupa koordinasi, pencatatan pelaporan monitoring dan evaluasi. Tidak terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan ini namun demikian pelaksanaan kegiatan terlaksana sebagaimana target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh pengelola program.

1.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 849.454.000. Alokasi anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan Tahun 2023 dan diperuntukkan bagi kegiatan tahun 2023 berupa penyediaan peralatan sanitarian kit. Peralatan ini digunakan untuk pemeriksaan kualitas air, makanan, dan lingkungan. Keberadaan sanitarian kit ini diharapkan dapat mendukung pemeriksaan secara rutin oleh petugas kesehatan terhadap kualitas lingkungan, termasuk kualitas air, makanan, dan lingkungan secara umum. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pelatihan bagi penjamah makanan di tempat-tempat pengelolaan makanan seperti katering dan rumah makan, dengan tujuan agar kualitas makanan dapat memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku. Hingga saat ini, realisasi anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 488.464.000, atau 57,50% dari total anggaran.

1.2.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 372.860.000 Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2023 dan APBD Kota Bandar Lampung. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sector dalam upaya pelayanan promosi kesehatan masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp.307.905.160 (82,58%).

1.2.19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 196.000.000 Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan tahun anggaran 2022. Realisasi anggaran Rp. 135.960.000 (69,37%) yang diperuntukan bagi peningkatan capaian pelaksanaan imunisasi melalui pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi pencatatan pelaporan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kegiatan survailans dan imunisasi.

1.2.20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000. Alokasi anggaran ini bersum berdari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.500.000 (27%). Realisasi kegiatan berupa Pertemuan evaluasi dan validasi data program Kesehatan jiwa, Sosialisasi Penggunaan Alat HRV, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas

1.2.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000, bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Realisasi anggaran hingga saat ini mencapai Rp 13.500.000, atau 27% dari total anggaran. Anggaran ini diperuntukkan bagi koordinasi pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dalam capaian pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA.

1.2.22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.400.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan tahun 2023. Realisasi anggaran Rp.11.400.000(100%) yang diperuntukkan bagi Koordinasi pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam capaian pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

1.2.23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 107.902.211.281 terserap sebesar Rp. 41.020.221.657 (38,02%). Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan Kesehatan masyarakat jaminan Kesehatan masyarakat

perkotaan. Pembayaran klaim ini bagi rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung (13 RumahSakit) dan 31 Puskesmas. Pada tahun 2023 ini jumlah kepesertaan JKN di Kota Bandar Lampung telah mencapai universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah kepesertaan JKN sebanyak 95,48% dari seluruh total penduduk Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.3 Data Kunjungan Pasien Pengobatan Gratis Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2023

No	Sarana	Kunjungan Pasien (Tahun)							Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	RumahSakit	25.585	18.219	18.166	10.991	19.882	28.953	20.597	Data bulan Nopember
2.	Puskesmas	281.866	242.184	140.941	186.505	158.755	182.117	148.785	
	Jumlah	307.451	260.403	159.107	197.496	178.637	211.070	169.382	

1.2.24. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Didukung dengan anggaran sebesar Rp 216.760.000, yang telah direalisasikan sepenuhnya sebesar Rp 216.760.000 (100%). Alokasi anggaran ini digunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2022, yaitu pengadaan perlengkapan penunjang dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui penyediaan telemedicine di Puskesmas. Dengan adanya penyediaan alat kesehatan ini, diharapkan kualitas kesehatan ibu hamil akan meningkat dan jumlah kematian ibu hamil saat melahirkan akan menurun. Kegiatan pengadaan telah terlaksana 100 persen melalui proses pengadaan dengan metode e-purchasing/ekatalog. Pembayaran untuk kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

1.2.25. Operasional Pelayanan Puskesmas. Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.807.971.825, realisasi sebesar Rp.13.238.146.255 atau mencapai 70,39 persen. Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa :

- a) Biaya operasional Puskesmas Rp. 1.822.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 850.620.199 (46,69%). Biaya operasional ini merupakan dukungan dana dari APBD untuk operasional rutin Puskesmas seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan sampah dan operasional rutin lainnya.
- b) Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan tahun 2023. Anggaran di pergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.420.514.000 dengan realisasi anggaran Rp. 11.822.068.231 (72,00%).
- c) Pembayaran biaya operasional Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp. 565.457.825 (realisasi 100 %)

1.2.26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.417.591.425, yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran hingga saat ini mencapai Rp 8.348.590.000, atau 45,33% dari total anggaran. Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 50% berupa penyaluran bantuan biaya operasional Posyandu dan Poskeskel sebanyak 705 unit. Pembayaran untuk transport kader Posyandu dan Poskeskel tahun 2023 telah dilakukan untuk 2 bulan. Selain itu, pembayaran sewa gedung bangunan Poskeskel telah dilakukan untuk 65 Poskeskel yang belum memiliki gedung sendiri, sementara 54 gedung Poskeskel lainnya adalah milik masyarakat yang dibangun dari dana pemerintah dan swasta.

1.2.27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 308.064.169 sumber anggaran berasal dari DAK dan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Alokasi anggaran ini diperuntukan bagi pengelolaan, pembinaan manajemen Puskesmas berupa

koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen Puskesmas dan untuk Pembinaan dalam rangka persiapan reakreditasi Puskesmas. Akreditasi adalah bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kualitas pelayanan oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas). Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh lembaga kompeten yang telah ditunjuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp252.879.799 (82.09%) dengan output kegiatan 31 Puskesmas di akhir tahun 2023 telah dilakukan proses re akreditasi dengan hasil sampai dengan akhir Bulan Januari 2024, Puskesmas dengan predikat Paripurna sebanyak 16 Puskesmas dan 9 Puskesmas dengan predikat utama. Untuk 6 Puskesmas menunggu hasil penilaian.

1.2.28. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.189.868.575 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Pada sub kegiatan ini di tahun 2023 realisasi anggaran dibayarkan tahun anggaran 2024. Namun demikian kegiatan berupa. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan cetak media informasi terkait pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah terlaksana.

1.2.29. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengantuber kulosis

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 18.000.000 (18%)

1.2.30. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000, bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran mencapai Rp 96.740.000, atau 96,74% dari total anggaran. Anggaran ini diperuntukkan bagi pertemuan koordinasi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan untuk orang dengan HIV (ODHIV).

1.2.31. Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 476.870.500. Realisasi anggaran Rp.314.553.595 (65,96%). Alokasi anggaran dipergunakan untuk pembelian insektisida dalam upaya pencegahan malaria. Selain itu anggaran juga dipergunakan dalam rangka koordinasi, monitoring evaluasi dan advokasi dalam upaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan malaria.

1.2.32. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 31.558.134 bersumber anggaran APBD. Realisasi anggaran Rp. 8.815.000 (27,93%) yang dipergunakan untuk updating web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebaran informasi.

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp.232.450.275 yang bersumber dari DAK Bidang kesehatan dan APBD tahun 2023. Output kinerja dari program adalah peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.916.000 (43,79%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000 Alokasi anggaran direncanakan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan/ kredensial sumber daya manusia kesehatan yang berada di fasilitas Kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Tidak ada realisasi anggaran pada sub kegiatan ini, namun demikian rencana pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan tetap dilakukan melalui kegiatan rutin dalam persiapan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

2.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dengan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 132.450.275 yang bersumber dari DAK bidang Kesehatan tahun 2023. Output dari alokasi anggaran ini adalah terlaksananya pertemuan perencanaan terintegrasi dalam upaya peningkatan kompetensi petugas dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.916.000 (24,85%).

2. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 203.330.000 yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Output kinerja terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, tokoobat) dan industri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 161.742.000 (79,55%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri RumahTangga.

Kegiatan ini di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT. Alokasi anggaran sebesar Rp. 153.350.000 dengan realisasi Rp. 111.762.000 (72,88%) yang terdiri dari :

- a) Pembayaran kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 28,350,000 (realisasi 100%)
- b) Pembayaran kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 83.412.000.

3.2. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga dengan Sub Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industry rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

Dukungan anggaran sebesar Rp. 49.980.000 dipergunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2022 (realisasi 100%).

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp.596.825.000 yang bersumber dari DAK bidang Kesehatan tahun 2023 dan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp.395.204.000 (95,81%). Rincian sebagai berikut :

1.1. KegiatanAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan di dukung Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Output kegiatan terlasananya advokasi promosi bidang Kesehatan melalui berbagai pertemuan yang melibatkan berbagai lintas sector dalam

upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kepada berbagai program atau hal terkait kesehatan, selain itu juga tersedianya berbagai media informasi dalam upaya promosi Kesehatan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.000.000 (realisasi Rp 94.704.000) dan Hibah keuangan kepada lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kota Bandar Lampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.500.000 (realisasi Rp.300.500.000)

1.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat

Dukungan anggaran Sebesar Rp. 184.325.000 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp.99.725.000 (54.10%) yang diperuntukan bagi kampanye edukasi berbagai program kesehatan dan gizi kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat.

3. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023

Adapun capain SPM Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2022 Sampai dengan Bulan November 2023 dapat dijelaskan pada table 3.2berikut:

Tabel 3.2 Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun2023

CAPAIAN SPM TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN Tahun 2023	TARGET Renstra 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%
		2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%	100%
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%	100%
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%

	11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%
	12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) belum sesuai standar
- 2) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan
- 3) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita
- 4) Penyakit-penyakit degenerative akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup cenderung meningkat
- 5) Penempatan tenaga kesehatan (perawat dan dokter) di sarana pelayanan Kesehatan khususnya Puskesmas belum merata
- 6) Penyediaan pembiayaan kesehatan

2.4 Review terhadap rancangan awal OPD

Review terhadap rancangan awal OPD dapat dilihat pada tabel T-C. 31 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Kota Banda Lampung yaitu masih ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja OPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme bottom up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan diakomodir dalam

rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan tujuan yang bermutu; peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan sanitasi; peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Adapun usulan rencana yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu antara lain :

1. Pelatihan kader PHBS, kelompok pemakai sarana sanitasi.
2. Penyuluhan pada kelompok masyarakat meliputi bidang kesehatan lingkungan, PHBS, perbaikan gizi termasuk pemberian makanan pendamping ASI dan penanganan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
3. Pembinaan dan pengembangan posyandu, posbindu, Poskeskeskel keluarahan siaga termasuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu dalam upaya meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka penjaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat.
5. Lokakarya mini di tingkat puskesmas baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang rutin dilaksanakan (bulanan, triwulan). Usulan Program dan kegiatan yang melalui mekanisme Musrenbang sebagai salah satu pemangku kepentingan pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan Untuk mendukung Kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadiresponsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Dengan adanya Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, maka diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Guna menyelaraskan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maupun pembangunan antara daerah tersebut, maka salah satunya dilakukan melalui penyusunan Renja OPD. Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.2.1. VISI

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang, maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4. Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

BANDAR LAMPUNG:Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

SEHAT:Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

CERDAS:adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN:adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA:Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

NYAMAN:Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakatkota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

UNGGUL:Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung

BERDAYA SAING :Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

EKONOMI UNTUK:Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan

KEMAKMURAN:yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

3.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan

diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA: Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada

akhirnya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA:Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka melayani kebutuhan distribusi perekonomian dan pengembangan investasi serta kebutuhan sosial masyarakat.

MISI KEEMPAT:Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI KELIMA:Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius, berbasis keluarga dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional..

MISI KEENAM:Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri serta berkelanjutan dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain untuk mengembangkan produk-produk lokal hingga berdaya saing serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka

menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan yang didukung oleh tingkat keamanan kota terpadu dengan melibatkan kerjasama antara aparaturnya keamanan serta partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Periode 2021-2026

Visi		Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.							
Misi 1		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan mengurangi prevalensi kekurangan gizi pada balita 2. Meningkatkan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi, kunjungan ibu hamil dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu 3. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas 					
2.		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengoptimalkan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah 					
3.		Meningkatnya pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas baik sarana prasarana maupun pelayanan kesehatan. 2. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang meliputi pembiayaan, sumber daya manusia dan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar melalui akreditasi Puskesmas, 6. Pengembangan guideline pelayanan kesehatan, termasuk Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi 7. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 8. Menjamin keamanan. Khasiat, kemanfaatan dan mutu kefarmasian termasuk obat tradisional dan makanan 9. Pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional 					

Visi		Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.							
Misi 1		: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat							
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2. Meningkatkan peran petugas kesehatan dalam upaya promosi kesehatan	11. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program termasuk lembaga swasta untuk melakukan kampanye kesehatan.					

3.3. Program dan Kegiatan

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan tersebut dijabarkan dalam sasaran pelaksanaan program-program bidang kesehatan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	94,2	100	100	100	100	100	100	100
	2 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	95,64	100	100	100	100	100	100	100
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	94,71	100	100	100	100	100	100	100
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	%	87,51	100	100	100	100	100	100	100
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	85,76	100	100	100	100	100	100	100
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	46,72	100	100	100	100	100	100	100
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	%	83,30	100	100	100	100	100	100	100
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	47,81	100	100	100	100	100	100	100
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,79	100	100	100	100	100	100	100
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	71,00	100	100	100	100	100	100	100
	11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	55,60	100	100	100	100	100	100	100
	12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		80,74	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	kasus	10	10	10	10	10	10	10	10
	14 Insidensi TB per 100.000 penduduk	angka	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000	231/100000
	15 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
	16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	59,00	59,00	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00
	17 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	8,90	8,90	8,90	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.1.3 Meningkatkan Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	18 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	%	49,00	49,00	55,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00

2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Dinas kesehatan Tahun 2023, dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang mendukung Program kegiatan kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berdasarkan Indikator Sasaran dan Target dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.756.536.766 dengan realisasi sebesar Rp. 254.909.601.865 (72,67%). Anggaran tersebut diperuntukan bagi 5 Program dan 18 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan bidang kesehatan. Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 22 sub kegiatan merupakan program pendukung bagi terselenggaranya tupoksi Dinas Kesehatan yang bersifat rutin dilaksanakan. Untuk itu yang akan dikupas lebih mendalam adalah pelaksanaan 4 (empat) program lainnya yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 177.441.169.061. Output kinerja dari program adalah angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 10 kasus, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 6,50 persen, tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk sebanyak 231 kasus dan cakupan pelayanan BLUD 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 88.039.026.743 (49,62 %). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut

1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 18.881.569.830 dan realisasi anggaran Rp. 17.002.523.545 (90,05%). Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan pendukungnya yaitu :

1.1.1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Alokasi anggaran pada Sub kegiatan ini diperuntukan untuk rehab bangunan Instalasi Farmasi (IFK) Kesehatan Dinas Kesehatan yang kondisinya sudah tidak lagi maksimal dalam melaksanakan

fungsinya dalam melakukan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan lainnya.

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.841.850.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Anggaran ini telah terealisasi 63,61 persen atau sebesar Rp. 2.443.907.030 dengan realisasi fisik 100 persen. Saat ini bangunan telah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.1.2. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.606.290.000 yang diperoleh dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar Rp.1.500.000.00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan sebesar Rp. 106.290.000. Output kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan jenazah sebanyak 5 unit dan perlengkapan penunjang instalasi farmasi. Keberadaan kendaraan jenazah ini merupakan salah satu kegiatan prioritas dari Wali Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas kendaraan jenazah ini secara gratis. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.377.250.000 atau sebesar 85,75 persen

1.1.3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 5.527.062.735 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Realisasi sebesar Rp.5.464.303.600 (98,86%). Output kinerja tersedianya peralatan kesehatan di Puskesmas untuk melengkapi kebutuhan peralatan kesehatan sesuai standar. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut berupa pembayaran kegiatan pembelian alat kesehatan tahun 2022 sebesar Rp. 2,005,752,735 (realisasi 100%), dan untuk pembayaran kegiatan

pembelian alat kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 3,521,310,000 dan baru terealisasi sebesar Rp. 3.458.550.865 (98,21%)

1.1.4. Pengadaan obat, vaksin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 5.877.266.559 sumber anggaran APBD dan DAK bidang kesehatan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan obat dari dana DAK. Alokasi anggaran dari DAK hanya untuk kegiatan penyusunan kebutuhan obat. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan obat pelayanan dasar di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.688.051.879 (96,78%) dengan rincian :

- a) Pembayaran kegiatan pengadaan obat DAK tahun 2022 sebesar Rp. 2,843,103,559 (realisasi 100%)
- b) Pengadaan obat tahun 2023 bersumber anggaran APBD 2023 Rp. 3.000.000.000, anggaran terealisasi 100 persen.

1.1.5. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Dukungan anggaran sebesar Rp. 2.029.100.536 sumber anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Output kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan Bahan Habis Pakai di 31 Puskesmas dan 50 Puskesmas Pembantu di Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.029.011.036 (100%). dengan rincian :

- a) Pembayaran kegiatan pengadaan obat tahun 2022 sebesar Rp. 1.029.011.036 (realisasi 100%)
- b) Pengadaan Bahan Habis Pakai tahun 2023 bersumber anggaran APBD 2023 Rp. 1.000.000.000, anggaran terealisasi 100 persen.

1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 158.528.041.097 dan realisasi anggaran Rp. 71.027.688.198 (44,80%). Kegiatan ini

terdiri dari 30 ub Kegiatan yang sebagian besar merupakan anggaran untuk mendukung tercapainya standar pelayanan (SPM) bidang kesehatan tahun 2023 yang sebagian besar juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2023, sub kegiatan tersebut yaitu :

1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dukungan anggaran sebesar Rp. 429.898.056 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah cakupan pemeriksaan ibu hamil, terlaksananya pertemuan peningkatan tablet FE pada ibu Hamil, tersedianya media penyuluhan untuk Ibu Hamil. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp.102.898.000 (23,94%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dukungan anggaran sebesar Rp. 172.422.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan ibu bersalin dan terkendalinya kasus kematian baik ibu maupun bayi. Kegiatan yang dilaksanakan berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu bersalin. Realisasinya anggaran sebesar Rp. 138.483.000 (80,32%). Realisasi fisik kegiatan 100 persen dilaksanakan.

1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

Dukungan anggaran sebesar Rp. 206.640.000 sumber anggaran berasal dari DAK bidang kesehatan tahun 2023. Output kinerja yang ingin dicapai adalah menurunnya kasus kematian bayi baru lahir. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.988.000 (78,39%).

1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Dukungan anggaran sebesar Rp. 223.290.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah

menurunnya kasus kematian bayi dan balita. Realisasi anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp.211.875.000 (94,89%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 309.884.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan Tahun 2023. Output kinerja yang ingin dicapai adalah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Untuk Penjarangan dan Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar secara berkala. Realisasi anggaran sebesar Rp. 152.225.000 (49,12%) dengan realisasi pekerjaan 100 persen terlaksana.

1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Dukungan anggaran sebesar Rp. 2.130.978.466, sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah upaya deteksi dini terhadap kanker serviks (kanker leher rahim) terutama pada wanita usia produktif). Upaya ini dilakukan dengan penyediaan bahan bahan untuk pemeriksaan kanker serviks. Dengan upaya dini tersebut diharapkan upaya pencegahan penyakit dapat dikendalikan. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.772.920.000 (83,20%) dengan pelaksanaan kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 67.168.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya orientasi penggunaan panduan praktis untuk caregiver informal pada perawatan jangka panjang bagi lansia untuk tenaga kesehatan di Puskesmas. Realisasi keuangan dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.973.000 (86,31%) dengan realisasi kegiatan 100 persen terlaksana.

1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 1.419.566.000 sumber

anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah penyediaan bahan-bahan untuk pelaksanaan deteksi dini dan monitoring kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) melalui Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) terutama untuk deteksi dini penyakit hipertensi/tekanan darah tinggi. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.414.736.964 (99,66%).

1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 1.074.539.200 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah upaya deteksi dini penyakit Diabetes Mellitus. Upaya deteksi ini bertujuan untuk menemukan kasus penyakit diabetes di masyarakat, dengan penemuan dini penyakit maka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini terlaksananya 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.053.432.768 (98,04%).

1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Dukungan anggaran sebesar Rp.109.487.600 sumber anggaran DAK bidang Kesehatan Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi dalam bentuk Pertemuan Sosialisasi kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan dan keluarga penderita gangguan jiwa yang ada di Puskesmas. Kegiatan terlaksana 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp. 107.446.000 (98,16%)

1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

Dukungan anggaran sebesar Rp.2.694.065.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya deteksi dini orang dengan resiko tuberkulosis. Alokasi anggaran ini dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan pemeriksaan deteksi dini penyakit tuberkulosis (Katrid Test Cepat Molekuler/TCM). Namun dalam perjalanan kegiatan terdapat surat pemberitahuan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular kementerian Kesehatan RI Nomor PM.01.06/C.III/3447/2023 Tanggal 18 April 2023 Tentang Tindak Lanjut Pembekuan Komponen Pengadaan Katrid TCM TBC. Pengadaan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan dan akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini Dinas Kesehatan telah menerima secara bertahap TCM katrid tersebut.

1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Dukungan anggaran sebesar Rp.300.000.000 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Sama halnya dengan alokasi anggaran pada sub kegiatan sebelumnya, output kinerja yang ingin dicapai adalah deteksi dini orang dengan resiko penyakit HIV. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini Rp. 263.500.000 (87,83%), realisasi kegiatan 100 persen.

1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB). Dukungan anggaran sebesar Rp. 87.710.500 sumber anggaran DAK bidang kesehatan. Output kinerja yang ingin dicapai dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas petugas pengelola data kegiatan surveilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.767.450 (98,92%) dengan realisasi kegiatan terlaksana 100 persen.

1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana.

Dukungan anggaran sebesar Rp. 953.995.000 sumber dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang diperuntukan bagi operasional pelayanan ambulan gratis diantara untuk penyediaan bahan bakar, insentif sopir, servis kendaraan ambulan, pengisian tabung oksigen. Realisasi anggaran sebesar

Rp. 818.322.000 (85,78%).Berikut data masyarakat yang menggunakan fasilitas ambulan gratis tahun 2023

Tahun	Pasien sakit	Jenazah	Melahirkan	Lakalantas	Jumlah
2017	4.258	234	143	1463	6.098
2018	4.873	144	123	1653	6.793
2019	6.038	113	135	1678	7.964
2020	4.952	105	75	1916	7.048
2021	3.667	61	34	1998	5.760
2022	3.795	48	20	1570	5.433
2023	3.388	41	3	1337	4.769

1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 337.056.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus/DAK bidang kesehatan tahun 2023. Penggunaan anggaran dari sub kegiatan ini diperuntukan bagi bebarapa pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dan upaya penanggulangan stunting mulai dari penyusunan regulasi, pemantapan kompetensi petugas dalam pelayanan gizi dan penanggulangan stunting serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Realisasi anggaran Rp. 295.268.000 (87,60%).

1.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 Alokasi anggaran ini berasal dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. diperuntukan bagi kegiatan terkait kesehatan olahraga di tahun 2023, berupa koordinasi, pencatatan pelaporan monitoring dan evaluasi. Tidak terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan ini namun demikian pelaksanaan kegiatan terlaksana sebagaimana target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh pengelola program.

1.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 849.454.000 . Alokasi anggaran ini berasal dari DAK bidang kesehatan Tahun 2023. diperuntukan bagi kegiatan tahun 2023 berupa penyediaan peralatan sanitarian kit yaitu peralatan yang dipergunakan untuk pemeriksaan kualitas air, makanan dan lingkungan. Keberadaan sanitarian kit ini diharapkan dapat dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh petugas kesehatan terhadap kualitas lingkungan baik itu kualitas air, makanan dan lingkungan. Pada kegiatan ini juga dilakukan pelatihan bagi penjamah makanan di tempat-tempat pengelolaan makanan seperti katering, rumah makan sehingga diharapkan kualitas makanan dapat memenuhi persyaratan kesehatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 488.464.000 (57,50%)

1.2.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 372.860.000 Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2023 dan APBD Kota Bandar Lampung.. Alokasi anggaran dipergunakan untuk pertemuan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya pelayanan promosi kesehatan ke masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp. 307.905.160 (82,58%).

1.2.19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 196.000.000 Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Realisasi anggaran Rp. 135.960.000 (69,37%) yang diperuntukan bagi peningkatan capaian pelaksanaan imunisasi melalui pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kegiatan surveilans dan imunisasi.

1.2.20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000. Alokasi anggaran ini bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.500.000 (27%). Realisasi kegiatan berupa Pertemuan evaluasi dan validasi data program kesehatan jiwa, Sosialisasi Penggunaan Alat HRV, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas

1.2.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000. bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung tahun 2023. Realisasi anggaran Rp. 13.500.000 (27%) yang diperuntukan bagi Koordinasi pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam capaian pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA.

1.2.22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.11.400.000 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Realisasi anggaran Rp. 11.400.000 (100%) yang diperuntukan bagi Koordinasi pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan dalam capaian pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

1.2.23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 107.902.211.281 terserap sebesar Rp. 41.020.221.657 (38,02%). Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa pembayaran klaim Rumah Sakit dan Puskesmas bagi pasien yang menggunakan fasilitas program pelayanan kesehatan masyarakat jaminan kesehatan masyarakat perkotaan. Pembayaran klaim ini bagi rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung (13 Rumah Sakit) dan 31 Puskesmas. Pada tahun 2023 ini jumlah kepesertaan JKN di Kota Bandar Lampung telah mencapai universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah

kepesertaan JKN sebanyak 95,48% dari seluruh total penduduk Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.3 Data Kunjungan Pasien Pengobatan Gratis Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2023

No	Sarana	Kunjungan Pasien (Tahun)							Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Rumah Sakit	25.585	18.219	18.166	10.991	19.882	28.953	20.597	Data bulan Nopember
2.	Puskesmas	281.866	242.184	140.941	186.505	158.755	182.117	148.785	
	Jumlah	307.451	260.403	159.107	197.496	178.637	211.070	169.382	

1.2.24. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 216.760.000 realisasi sebesar Rp.216.760.000 (100%) Alokasi anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2022 yaitu pengadaan perlengkapan penunjang dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui penyediaan telemedicine di Puskesmas. Dengan penyediaan alat kesehatan ini diharapkan kualitas kesehatan ibu hamil akan meningkat dan jumlah kematian ibu hamil melahirkan juga akan menurun. Kegiatan pengadaan terlaksana 100 persen melalui proses pengadaan dengan metode *e purchasing/ekatalog*. Pembayaran baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

1.2.25. Operasional Pelayanan Puskesmas. Didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.807.971.825, realisasi sebesar Rp.13.238.146.255 atau mencapai 70,39 persen. Pencapaian kegiatan sebesar 100 persen berupa :

a) Biaya operasional Puskesmas Rp. 1.822.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 850.620.199 (46,69%). Biaya operasional ini merupakan dukungan dana dari APBD untuk operasional rutin Puskesmas seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan sampah dan operasional rutin lainnya.

b) Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023.

Anggaran dipergunakan untuk dukungan kegiatan pelayanan di 31 Puskesmas terutama pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.420.514.000 dengan realisasi anggaran Rp. 11.822.068.231 (72,00%).

c) Pembayaran biaya operasional Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp. 565.457.825 (realisasi 100 %)

1.2.26. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.417.591.425 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 8.348.590.000 (45,33%). Realisasi pencapaian kinerja output sebesar 50 persen berupa tersalurnya bantuan biaya operasional Posyandu dan Poskeskel sebanyak 705. Realisasi pembayaran transport kader Posyandu dan Poskeskel tahun 2023 untuk 2 bulan. Sedangkan untuk pembayaran sewa gedung bangunan Poskeskel sebanyak 65 Poskeskel yang belum memiliki bangunan gedung sendiri, 54 gedung Poskeskel lainnya adalah milik masyarakat yang di bangun dari dana pemerintah dan swasta.

1.2.27. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 308.064.169 sumber anggaran berasal dari DAK dan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Alokasi anggaran ini diperuntukan bagi pengelolaan, pembinaan manajemen Puskesmas berupa koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen Puskesmas dan untuk pembinaan dalam rangka persiapan reakreditasi Puskesmas. Akreditasi adalah bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kualitas pelayanan oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas). Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh lembaga kompeten yang telah ditunjuk Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Kesehatan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 252.879.799 (82.09%) dengan output kegiatan 31 Puskesmas di akhir tahun 2023 telah dilakukan proses re akreditasi dengan hasil sampai dengan akhir Bulan Januari 2024, Puskesmas dengan predikat Paripurna sebanyak 16 Puskesmas dan 9 Puskesmas dengan predikat utama. Untuk 6 Puskesmas menunggu hasil penilaian.

1.2.28. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 189.868.575 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Pada sub kegiatan ini di tahun 2023 realisasi anggaran dibayarkan tahun anggaran 2024. Namun demikian kegiatan berupa. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan cetak media informasi terkait pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah terlaksana.

1.2.29. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 18.000.000 (18%)

1.2.30. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 sumber anggaran berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran Rp. 96.740.000 (96,74%) yang diperuntukan bagi pertemuan koordinasi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV).

1.2.31. Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 476.870.500. Realisasi anggaran Rp. 314.553.595 (65,96%).

Alokasi anggaran dipergunakan untuk pembelian insektisida dalam upaya pencegahan malaria. Selain itu anggaran juga dipergunakan dalam rangka koordinasi, monitoring evaluasi dan advokasi dalam upaya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan malaria.

1.2. **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 31.558.134 bersumber anggaran APBD. Realisasi anggaran Rp. 8.815.000 (27,93%) yang dipergunakan untuk updating web Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai sarana penyebarluasan informasi.

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp.232.450.275 yang bersumber dari DAK Bidang kesehatan dan APBD tahun 2023. Output kinerja dari program adalah peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.916.000 (43,79%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000 Alokasi anggaran direncanakan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan/ kredensial sumber daya manusia kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Tidak ada realisasi anggaran pada sub kegiatan ini, namun demikian rencana pembinaan dan pengembangan SDM kesehatan tetap dilakukan melalui kegiatan rutin dalam persiapan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

2.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi dengan Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dukungan anggaran untuk kegiatan ini Rp. 132.450.275 yang bersumber dari DAK bidang kesehatan tahun 2023. Output dari alokasi anggaran ini adalah terlaksananya pertemuan perencanaan terintegrasi dalam upaya peningkatan kompetensi petugas dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 32.916.000 (24,85%).

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 203.330.000 yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Output kinerja terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi sarana kefarmasian (apotek, toko obat) dan industri makanan rumah tangga yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran sebesar Rp. 161.742.000 (79,55%). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT. Alokasi anggaran sebesar Rp. 153.350.000 dengan realisasi Rp. 111.762.000 (72,88%) yang terdiri dari :

- a) Pembayaran kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 28,350,000 (realisasi 100%)
- b) Pembayaran kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 83.412.000.

3.2. Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga dengan Sub Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk

makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan

Dukungan anggaran sebesar Rp. 49.980.000 dipergunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2022 (realisasi 100%).

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 596.825.000 yang bersumber dari DAK bidang kesehatan tahun 2023 dan APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp. 395.204.000 (95,81%). Rincian sebagai berikut :

3.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan di dukung Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Output kegiatan terlasananya advokasi promosi bidang kesehatan melalui berbagai pertemuan yang melibatkan berbagai lintas sektor dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kepada berbagai program atau hal terkait kesehatan, selain itu juga tersedianya berbagai media informasi dalam upaya promosi kesehatan kepada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.000.000 (realisasi Rp 94.704.000) dan Hibah keuangan kepada lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Kota Bandar Lampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.500.000 (realisasi Rp.300.500.000)

3.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat

Dukungan anggaran Sebesar Rp. 184.325.000 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp. 99.725.000 (54.10%) yang diperuntukan bagi kampanye edukasi berbagai program kesehatan dan gizi kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat.

3. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023

Adapun capain SPM Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2022 Sampai dengan Bulan November 2023 dapat dijelaskan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tabel Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

CAPAIAN SPM TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN Tahun 2023	TARGET Renstra 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%
		2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%	100%
		3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%
		4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%
		5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%
		6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%
		7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%	100%
		8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%
		9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
		10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%
		11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%
		12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) belum sesuai standar
- 2) Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit yang disebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah lingkungan

- 3) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita
- 4) Penyakit-penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan dan pola hidup cenderung meningkat
- 5) Penempatan tenaga kesehatan (perawat dan dokter) di sarana pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas belum merata
- 6) Penyediaan pembiayaan kesehatan

2.4 Review terhadap rancangan awal OPD

Review terhadap rancangan awal OPD dapat dilihat pada tabel T-C. 31 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Kota Banda Lampung yaitu masih ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja OPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme bottom up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan

diakomodir dalam rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan tujuan yang bermutu; peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan sanitasi; peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Adapun usulan rencana yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu antara lain :

1. Pelatihan kader PHBS, kelompok pemakai sarana sanitasi.
2. Penyuluhan pada kelompok masyarakat meliputi bidang kesehatan lingkungan, PHBS, perbaikan gizi termasuk pemberian makanan pendamping ASI dan penanganan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
3. Pembinaan dan pengembangan posyandu, posbindu, Poskeskeskel keluarahan siaga termasuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu dalam upaya meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka penjaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat.
5. Lokakarya mini di tingkat puskesmas baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang rutin dilaksanakan (bulanan, triwulan). Usulan Program dan kegiatan yang melalui mekanisme Musrenbang sebagai salah satu pemangku kepentingan pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN										
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL				
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	172.282.762.430	166.180.988.122	96,46	172.104.743.503	166.180.988.122	96,56	178.018.927	-	0		
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	16.968.993	67,88	25.000.000	16.968.993	67,88	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	16.968.993	67,88	25.000.000	16.968.993	67,88	-	-	0		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.858.032.030	79.681.654.777	98,55	80.858.032.030	79.681.654.777	98,55	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.642.032.030	79.527.366.127	98,62	80.642.032.030	79.527.366.127	98,62	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.000.000	154.288.650	71,43	216.000.000	154.288.650	71,43	-	-	0		
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	4.500.000		25.000.000	4.500.000		-	-			
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi	25.000.000	4.500.000		25.000.000	4.500.000		-	-			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.560.763	233.596.032	84,16	277.560.763	233.596.032	84,16	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000	19.996.000	99,98	20.000.000	19.996.000	99,98	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	45.325.500	90,65	50.000.000	45.325.500	90,65	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.060.763	11.688.763	96,92	12.060.763	11.688.763	96,92	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.101.500	97,01	30.000.000	29.101.500	97,01	-	-	0		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN						BELANJA MODAL		
		TOTAL			BELANJA OPERASI			ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	48.905.000	97,81	50.000.000	48.905.000	97,81	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000	7.500.000	100,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	7.210.000	90,13	8.000.000	7.210.000	90,13	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	63.869.269	63,87	100.000.000	63.869.269	63,87	-	-	0
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.018.927	77.850.000		-	77.850.000	0,00	178.018.927	77.850.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	100.000.000	0	0,00		0	0,00	100.000.000	0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.018.927	77.850.000			77.850.000	0,00	78.018.927	77.850.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.467.084.000	21.258.404.910	90,59	23.467.084.000	21.258.404.910	90,59	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	188.000.000	170.620.910	90,76	188.000.000	170.620.910	90,76	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.279.084.000	21.087.784.000	90,59	23.279.084.000	21.087.784.000	90,59	-	-	0
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	755.220.710	372.207.975	49,28	755.220.710	372.207.975	49,28	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	28.800.000	96,00	30.000.000	28.800.000	96,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.220.710	280.788.475	54,50	515.220.710	280.788.475	54,50	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN									
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	5.870.000	58,70	10.000.000	5.870.000	58,70	-	-		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	49.709.500	33,14	150.000.000	49.709.500	33,14	-	-		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	7.040.000	14,08	50.000.000	7.040.000	14,08	-	-		
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	-	-		
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	66.696.846.000	64.535.805.435	96,76	-	-	0	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.441.169.061	88.039.026.743	49,62	166.249.206.326	78.536.806.113	47,24	11.191.962.735	9.502.220.630	84,90	
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	18.881.569.830	17.002.523.545	90,05	7.906.367.095	7.717.062.915	97,61	10.975.202.735	9.285.460.630	84,60	
	Sub Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.841.850.000	2.443.907.030	63,61				3.841.850.000	2.443.907.030	63,61	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	1.606.290.000	1.377.250.000	85,74				1.606.290.000	1.377.250.000	85,74	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.527.062.735	5.464.303.600	98,86			0,00	5.527.062.735	5.464.303.600	98,86	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin	5.877.266.559	5.688.051.879	96,78	5.877.266.559	5.688.051.879	96,78			0	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.029.100.536	2.029.011.036	100,00	2.029.100.536	2.029.011.036	100,00			0	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	158.528.041.097	71.027.688.198	44,80	158.311.281.097	70.810.928.198	44,73	216.760.000	216.760.000	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	429.898.056	102.898.000	23,94	429.898.056	102.898.000	23,94	-	-	0	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN												
		TOTAL					BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	172.422.000	138.483.000	80,32	172.422.000	138.483.000	80,32	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	206.640.000	161.988.000	78,39	206.640.000	161.988.000	78,39	-	-	-	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	223.290.000	211.875.000	94,89	223.290.000	211.875.000	94,89	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	309.884.000	152.225.000	49,12	309.884.000	152.225.000	49,12	-	-	-	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.130.978.466	1.772.920.000	83,20	2.130.978.466	1.772.920.000	83,20	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	67.168.000	57.973.000	86,31	67.168.000	57.973.000	86,31	-	-	-	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.419.566.000	1.414.736.964	99,66	1.419.566.000	1.414.736.964	99,66	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	1.074.539.200	1.053.432.768	98,04	1.074.539.200	1.053.432.768	98,04	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	109.487.600	107.446.000	98,16	109.487.600	107.446.000	98,16	-	-	-	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.694.065.000	-	0,00	2.694.065.000	-	0,00	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	300.000.000	263.500.000	87,83	300.000.000	263.500.000	87,83	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	953.995.000	818.322.000	85,78	953.995.000	818.322.000	85,78	-	-	-	-	0		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.056.000	295.268.000	87,60	337.056.000	295.268.000	87,60	-	-	-	-	0		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN												
		TOTAL					BELANJA OPERASI					BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	-		50.000.000	-		50.000.000	-					
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	849.454.000	488.464.000	57,50	849.454.000	488.464.000	57,50	849.454.000	488.464.000	57,50	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	372.860.000	307.905.160	82,58	372.860.000	307.905.160	82,58	372.860.000	307.905.160	82,58	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	196.000.000	135.960.000	69,37	196.000.000	135.960.000	69,37	196.000.000	135.960.000	69,37	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00	50.000.000	13.500.000	27,00	-	-		
0	Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11.400.000	11.400.000	100,00	11.400.000	11.400.000	100,00	11.400.000	11.400.000	100,00	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	107.902.211.281	41.020.221.657	38,02	107.902.211.281	41.020.221.657	38,02	107.902.211.281	41.020.221.657	38,02	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	216.760.000	216.760.000	100,00	216.760.000	216.760.000	100,00	216.760.000	216.760.000	100,00	216.760.000	216.760.000		
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas	18.807.971.825	13.238.146.255	70,39	18.807.971.825	13.238.146.255	70,39	18.807.971.825	13.238.146.255	70,39	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.417.591.425	8.348.590.000	45,33	18.417.591.425	8.348.590.000	45,33	18.417.591.425	8.348.590.000	45,33	-	-	0	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	308.064.169	252.879.799	82,09	308.064.169	252.879.799	82,09	308.064.169	252.879.799	82,09	-	-		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	189.868.575	-	0	189.868.575	-	0	189.868.575	-	0	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	100.000.000	18.000.000	18	100.000.000	18.000.000	18	100.000.000	18.000.000	18	-	-		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100.000.000	96.740.000	96,74	100.000.000	96.740.000	96,74	100.000.000	96.740.000	96,74	-	-		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	476.870.500	314.553.595	65,96	476.870.500	314.553.595	65,96			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	31.558.134	8.815.000	27,93	31.558.134	8.815.000	27,93	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31.558.134	8.815.000	27,93	31.558.134	8.815.000	27,93	-	-	0
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	232.450.275	32.916.000	14,16	232.450.275	32.916.000	14,16	-	-	0
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	100.000.000	0	0,00	100.000.000	0	0,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar	100.000.000	0	0,00	100.000.000	0	0,00	-	-	0
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	132.450.275	32.916.000	24,85	132.450.275	32.916.000	24,85	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.450.275	32.916.000	24,85	132.450.275	32.916.000	24,85	-	-	0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	203.330.000	161.742.000	79,55	203.330.000	161.742.000	79,55	-	-	0
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			0,00			0,00	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Kegiatan : Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	153.350.000	111.762.000	72,88	153.350.000	111.762.000	72,88	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT	153.350.000	111.762.000	72,88	153.350.000	111.762.000	72,88	-	-	0
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	49.980.000	49.980.000	100,00	49.980.000	49.980.000	100,00	-	-	0
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	49.980.000	49.980.000	100,00	49.980.000	49.980.000	100,00	-	-	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	596.825.000	494.929.000	82,93	596.825.000	494.929.000	82,93	-	-	0
	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	412.500.000	395.204.000	95,81	412.500.000	395.204.000	95,81	-	-	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN								
		TOTAL			BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	412.500.000	395.204.000	95,81	412.500.000	395.204.000	95,81	-	-	0
	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.325.000	99.725.000	54,10	184.325.000	99.725.000	54,10	-	-	0
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	184.325.000	99.725.000	54,10	184.325.000	99.725.000	54,10	-	-	0
	Jumlah Belanja Operasi	339.386.555.104			339.386.555.104		72,31			
	Jumlah Belanja Modal	11.369.981.662						11.369.981.662	9.502.220.630	83,57
	Jumlah Belanja Tidak Terduga									
	Jumlah Belanja Transfer	350.756.536.766	254.909.601.865	72,67	339.386.555.104	245.407.381.235	72,31			
	Total		254.909.601.865					11.369.981.662	9.502.220.630	83,57

Tabel 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025

KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPd							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF						TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	DINAS KESEHATAN							DINAS KESEHATAN						
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	98,00	Persen	355.135.137.347 216.900.594.319		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Kesehatan	98,00	Persen	355.135.137.347 216.900.594.319	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100,00	Persen	30.000.000	APBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100,00	Persen	30.000.000	APBD
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	Dokumen	30.000.000	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	Dokumen	30.000.000	APBD
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100,00	Persen	112.506.198.719		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100,00	Persen	112.506.198.719	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.194	Orang/Bulan	112.303.198.719	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.194	Orang/Bulan	112.303.198.719	APBD
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	203.000.000	APBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	203.000.000	APBD
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	Persen	50.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	Persen	50.000.000	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	50.000.000	APBD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	50.000.000	APBD
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100,00	Persen	437.560.763		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	100,00	Persen	437.560.763	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	APBD
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	APBD
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.060.763	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.060.763	APBD
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	APBD	Penyediaan bahan logistik kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	APBD
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	77.500.000	APBD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	77.500.000	APBD

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
				TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	10.000.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	10.000.000	APBD
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	28.000.000	APBD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	28.000.000	APBD
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150.000.000	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150.000.000	APBD
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100,00	Persen	226.018.927		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	100,00	Persen	226.018.927	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	100.000.000	APBD	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	100.000.000	APBD
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	126.018.927	APBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	126.018.927	APBD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100,00	Persen	20.244.100.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	100,00	Persen	20.244.100.000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	186.000.000	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	186.000.000	APBD
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	20.058.100.000	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	20.058.100.000	APBD
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara	100	Persen	709.869.910		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris Kantor yang Terpelihara	100	Persen	709.869.910	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	34.000.000	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	34.000.000	APBD
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit mobil. 38 unit motor	Unit	455.869.910	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit mobil. 38 unit motor	Unit	455.869.910	APBD
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	APBD
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	APBD
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	APBD	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	APBD
1.02.01.2.10	Peningkatan pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31	Unit	82.696.846.000		Peningkatan pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31	Unit	82.696.846.000	

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Bandar Lampung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31	Unit	82696846000	BLUD	Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Bandar Lampung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	31	Unit	82696846000	BLUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2	Angka	136.484.543.028		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	2	Angka	136.484.543.028	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10	Kasus					Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	10	Kasus		
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,30	Persen					Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,30	Persen		
			Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	384	Kasus					Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	384	Kasus		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	Persen	18.619.470.636		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	Persen	18.619.470.636	
	Pembangunan Puskesmas	Bandar Lampung	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Tersedia	2	Unit	2.000.000.000	APBD	Pembangunan Puskesmas	Bandar Lampung	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Tersedia	2	Unit	2.000.000.000	APBD
						1.000.000.000	DAK						1.000.000.000	DAK
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	8.279.685.000	DAK	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	8.279.685.000	DAK
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1	Unit	129.786.200	APBD	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/Alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah alat kesehatan/Ala penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1	Unit	129.786.200	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Bandar Lampung	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	1	Paket	5000000000	APBD	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Bandar Lampung	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	1	Paket	5000000000	APBD
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke	Bandar Lampung	Jumlah Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Paka (BMHP Makanan dan Minuman serta	1	paket	109.999.436	APBD	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas	Bandar Lampung	Jumlah Obat, vaksin, Bahan Medis Habis Paka (BMHP Makanan dan Minuman serta	1	paket	109.999.436	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	Persen	117.573.073.227	DAK	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	Persen	117.573.073.227	DAK
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Bandar Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592	Orang	488.870.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Bandar Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592	Orang	488.870.000	APBD
						550.000.000	DAK						550.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bandar Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702	Orang	450.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bandar Lampung	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702	Orang	450.000.000	APBD
						541.300.000	DAK						541.300.000	DAK
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bandar Lampung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.811	Orang	250.000.000	APBD	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bandar Lampung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17.811	Orang	250.000.000	APBD
						122.000.000	DAK						122.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bandar Lampung	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86.512	Orang	92.499.863	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bandar Lampung	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86.512	Orang	92.499.863	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Bandar Lampung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155442	Orang	550.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Bandar Lampung	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	155442	Orang	550.000.000	APBD
						514.500.000	DAK						514.500.000	DAK
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Bandar Lampung	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	754465	Orang	99.999.746	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Bandar Lampung	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	754465	Orang	99.999.746	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bandar Lampung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92994	Orang	100.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bandar Lampung	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	92994	Orang	100.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Bandar Lampung	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001	Orang	50.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Bandar Lampung	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200001	Orang	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Bandar Lampung	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18644	Orang	762.506.060	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Bandar Lampung	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18644	Orang	762.506.060	APBD
						500.000.000	DAK						500.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1882	Orang	99.999.584	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1882	Orang	99.999.584	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bandar Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474	Orang	550.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bandar Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474	Orang	550.000.000	APBD
						1.000.000.000	DAK						1.000.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bandar Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060	Orang	200.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bandar Lampung	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060	Orang	200.000.000	APBD
						200.000.000	DAK						200.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	952.286.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	952.286.000	APBD
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000	APBD
						150.000.000	DAK						150.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	50.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	100.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	100.000.000	APBD
						150.000.000	DAK						150.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	100.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	100.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	150.000.000	APBD	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	150.000.000	APBD
						150.000.000	DAK						150.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851	Orang	50.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851	Orang	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Bandar Lampung	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851	Orang	50.000.000	APBD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Bandar Lampung	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.851	Orang	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	100.000.000	APBD	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Dokumen	100.000.000	APBD
						200.000.000	DAK						200.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	70.526.927.037	APBD	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	70.526.927.037	APBD
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Bandar Lampung	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	100.000.000	DAK	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Bandar Lampung	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	100.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Dokumen	1.750.000.000	APBD	Operasional Pelayanan Puskesmas	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	Dokumen	1.750.000.000	APBD
						3.500.000.000	DAK						3.500.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	30.878.828.900	APBD	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	30.878.828.900	APBD
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	1	Laporan	50.000.000	APBD	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	1	Laporan	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Dokumen	50.000.000	APBD	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80	orang	93.356.037	APBD	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80	orang	93.356.037	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70	orang	50.000.000	APBD	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Bandar Lampung	Jumlah Orang dengan HIV (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70	orang	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Bandar Lampung	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30	orang	50.000.000	APBD	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Bandar Lampung	Jumlah Orang dmenderita malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30	orang	50.000.000	APBD
						50.000.000	DAK						50.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	dokumen	300.000.000	DAK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	dokumen	300.000.000	DAK
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	dokumen	50.000.000	DAK	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	dokumen	50.000.000	DAK
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	80,00	Persen	291.999.165,00	DAK	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	80,00	Persen	291.999.165,00	DAK
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	50.000.000	APBD	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						241.999.165	DAK						241.999.165	DAK
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	80,00	Persen	550.000.000,00		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	80,00	Persen	550.000.000,00	
1.02.03.2.02														
			Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60,00	Persen					Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60,00	Persen		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	persen	250.000.000,00		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82,00	persen	250.000.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Bandar Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50	Orang	100.000.000	APBD	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Bandar Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50	Orang	100.000.000	APBD
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	50.000.000	APBD	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	50.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				
				TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF				SUMBER DANA	TARGET KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82	persen	300.000.000,00			Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	82	persen	300.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Bandar Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200	orang	100.000.000	APBD	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Bandar Lampung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	200	orang	100.000.000	APBD
						200.000.000	DAK						200.000.000	DAK
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	95,00	Persen	450.000.000,00		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	95,00	Persen	450.000.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	100	persen	150.000.000,00		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	100	persen	150.000.000,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1	dokumen	50.000.000	APBD	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1	dokumen	50.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK
1.02.04.2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga sesuai standar	80,00	Persen	150.000.000,00		Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga sesuai standar	80,00	Persen	150.000.000,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1	Dokumen	50.000.000	APBD	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga		Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	100,00	Persen	150.000.000,00		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga		Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	100,00	Persen	150.000.000,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	50	Unit	50.000.000	APBD	Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Bandar Lampung	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	50	Unit	50.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK
1.02.05	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Masyarakat ber PHBS	75,00	Persen	750.000.000,00		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Masyarakat ber PHBS	75,00	Persen	750.000.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,00	persen	450.000.000,00		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,00	persen	450.000.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	450.000.000	APBD	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	450.000.000	APBD
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	82,00	persen	150.000.000,00		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	82,00	persen	150.000.000,00	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	50.000.000	APBD	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						100.000.000	DAK						100.000.000	DAK

KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			URUSAN/ BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			
				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	82,00	persen	150.000.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	82,00	persen	150.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Unava Kesehatan Bersumber Daya	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	1	Dokumen	50.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Unava Kesehatan	1	Dokumen	50.000.000	APBD
						100.000.000						100.000.000	DAK

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Permasalahan kesehatan di Kota Banda Lampung yaitu masih ada program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan SDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja OPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan mekanisme bottom up melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan

diakomodir dalam rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan tujuan yang bermutu; peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan sanitasi; peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Adapun usulan rencana yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu antara lain :

1. Pelatihan kader PHBS, kelompok pemakai sarana sanitasi.
2. Penyuluhan pada kelompok masyarakat meliputi bidang kesehatan lingkungan, PHBS, perbaikan gizi termasuk pemberian makanan pendamping ASI dan penanganan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
3. Pembinaan dan pengembangan posyandu, posbindu, Poskeskeskel keluarahan siaga termasuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu dalam upaya meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan penganggaran bidang kesehatan dalam rangka penjaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat.
5. Lokakarya mini di tingkat puskesmas baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang rutin dilaksanakan (bulanan, triwulan). Usulan Program dan kegiatan yang melalui mekanisme Musrenbang sebagai salah satu pemangku kepentingan pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. TAHUN 2023
KOTA BANDAR LAMPUNG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 20224 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
ISI DENGAN KODE URUSAN DAN NAMA URUSAN															
ISI DENGAN KODE BIDANG URUSAN DAN NAMA BIDANG URUSAN															
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kesehatan	persen	98,00%		98,00%	98,00%	100	98,00%		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100,00%		100,00%	100,00%	100	100,00%		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)	100	2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	persen	100,00%		100,00%	100,00%	100	100,00%		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	1.194		1.194	1.194	100	1.194		
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12 dokumen		1	1	100	1		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persen	100,00%		100,00%	100,00%	100	100,00%		
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10 orang		10 orang	10 orang	100	10 orang		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	persen	100,00%		100,00%	100,00%	100	100,00%		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	persen	98		98	98	100	98		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	unit								
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	persen	100,00%		100,00%	100,00%	100	100,00%		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1		1	1	100	1		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 20224 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inventaris Kantor yang Terpelihara	persen	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lananan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8 unit mobil. 38 unit motor		8 unit mobil. 38 unit motor	8 unit mobil. 38 unit motor		8 unit mobil. 38 unit motor		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1		1	1	100	1		
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	1		1	1		1		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Unitkerja	31		31	31	100	31		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unitkerja	31		31	31		31		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	2		2	2	100	2		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	persen	84		84	84	100	84		
1	02	02	2.01	0002	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1		1	1	100	1		
1	02	02	2.01	0007	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	3							
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	4		1	1	100	1		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	unit	1		1	1		1		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	1		1	1	100	1		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	paket	1		1	1		1		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	persen	84		100	100	100	100		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19.592		18.563	18.563	100	18.563		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18.702		18.563	18.563	100	18.563		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	17.811		18.066	18.066	100	18.066		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	86.512		86.268	86.268	100	86.268		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	155.442		154.145	154.145	100	154.145		
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	754.465		743.139	743.139	100	743.139		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 20224 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	92.994		88.000	88.000	100	88.000		
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	200.001		196.149	196.149	100	196.149		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18.644		70.647	70.647	100	70.647		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	1.882		1.851	1.851	100	1.851		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	23.474		21.426	21.426	100	21.426		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	28.060		28.981	28.981	100	28.981		
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1.851		1.851	1.851	100	1.851		
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	1.851		1.851	1.851	100	1.851		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	paket	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/Kota	unit	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	80,00		320	320	100	320		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	70,00		280	280	100	280		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	30,00		15	150	1000	150		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	persen	84		84	84	100	84		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 20224 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber daya manusia kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	persen	83		83	83	100	83		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	persen	84		84	84	100	84		
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	50		50	50	100	50		
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1,00		1,00	1,00	100	1,00		
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"	persen	84		84	84	100	84		
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	200		50	50	100	50		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar	persen	96		96	96	100	96		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengelolaan apotek,toko obat,toko alat kedehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	persen	100		100	100	100	100		
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1		1	1	100	1		
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	persen	80		80	80	100	80		
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	1		1	1	100	1		
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	persen	100		100	100	100	100		
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	100		50	50	100	50		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat ber PHBS	persen	80		80	80	100	80		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 20224 (Renja PD Tahun Berjalan)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2024)	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7/8) x 100	(10)	(11) = 6+8+10	(12) = (11/5) x 100
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "	<i>persen</i>	80		80	80	100	80		
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>dokumen</i>	1		1	1		1		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan "	<i>persen</i>	100		100	100		100		
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<i>dokumen</i>	1		1	1	100	1		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	<i>persen</i>	84		84	84		84		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<i>dokumen</i>	1		1	1	100	1		

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA				
		KELURAHAN KUPANG TEBA	Jumlah peralatan kesehatan di Posyandu.Poskeskel	9 Posyandu		
		KELURAHAN KUPANG KOTA LINGKUNGAN II RT 15		1 Poskeskel		
		KELURAHAN SUMUR BATU LINGKUNGAN II RT 19		1 Poskeskel		
		KECAMATAN TANJUNG SENANG	KELURAHAN PERUMNAS WAY KANDIS LINGKUNGAN II RT 2	Pembangunan posyandu untuk kelompok Posyandu Aster 8	1 unit	
				Jumlah Posyandu.Poskeskel dengan peralatan kesehatan mencukupi	1 paket	
		KECAMATAN SUKARAME	KELURAHAN KORPRI JAYA LINGKUNGAN I RT 1	Jumlah peralatan kesehatan di Posyandu.Poskeskel	1 Paket	
		KELURAHAN WAY DADI LINGKUNGAN II RT 7				
KECAMATAN RAJABASA	KELURAHAN RAJABASA PEMUKA LINGKUNGAN II	Jumlah peralatan kesehatan di Poskeskel				
KECAMATAN PANJANG						
	KELURAHAN SRENGSEM LINGKUNGAN II RT 19	Jumlah peralatan kesehatan di Posyandu	1 paket			
2	Pengadaan sarana di fasilitas	TANJUNG KARANG BARAT	Jumlah Peralatan untuk fogging	1 unit		
		KELURAHAN GEDONG AIR				
		KECAMATAN PANJANG	Jumlah lemari obat di Posyandu	1 unit		
		KELURAHAN KARANG MARITIM LINGKUNGAN I RT 3				
		KELURAHAN KETAPANG KUALA LINGKUNGAN I RT 4	Jumlah alat peraga edukatif di Posyandu	1 Paket		
		KELURAHAN WAY LUNIK	Jumlah Tempat cuci tangan	1 unit		
KECAMATAN LANGKUPURA	Jumlah Peralatan kesehatan di kelurahan se Kecamatan Langkapura	1 Paket				
3	Pembangunan Puskesmas	KECAMATAN KEMILING	Jumlah gedung Poskeskel di Kelurahan beringin raya dan kemiling raya	2 Unit		
		KELURAHAN KEMILING RAYA LINGKUNGAN I RT 1				
		KELURAHAN BERINGIN RAYA LINGKUNGAN III				
3	Pembangunan Puskesmas	KECAMATAN SUKABUMI	Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Sukabumi	1 unit		
		KELURAHAN CAMPANG RAYA LINGKUNGAN I RT 7				
4	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	KECAMATAN KEDATON	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	1 Unit		
		KELURAHAN KEDATON				
4	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	KECAMATAN PANJANG	Jumlah PMT untuk balita/baduta stunting	1 Paket		
		KELURAHAN SRENGSEM LINGKUNGAN II RT 23				

**TC.33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12			
					DINAS KESEHATAN		355.135.137.347,00	355.131.167.097,00		341.173.667.097,00	(13.961.470.250,00)	-	8.886.518.964,00	368.615.457.219,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		355.135.137.347,00	355.131.167.097,00		341.173.667.097,00	(13.961.470.250,00)	-	8.886.518.964,00	368.615.457.219,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		355.135.137.347,00	355.131.167.097,00		341.173.667.097,00	(13.961.470.250,00)	-	8.886.518.964,00	368.615.457.219,00
7	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	216.900.594.319,00	212.928.141.709,00	-	212.928.141.709,00	(3.972.452.610,00)	-	-	228.130.914.191,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	30.000.000,00	24.999.748,00	-	24.999.748,00	(5.000.252,00)	-	-	30.000.000,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000,00	24.999.748,00	2 Dokumen	24.999.748,00	(5.000.252,00)	-	30.000.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	112.506.198.719,00	112.110.092.619,00	-	112.110.092.619,00	(396.106.100,00)	-	-	123.736.518.591,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1194 Orang/bulan	112.303.198.719,00	111.907.198.719,00	1194 Orang/bulan	111.907.198.719,00	(396.000.000,00)	-	123.533.518.591,00
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	203.000.000,00	202.893.900,00	1 Dokumen	202.893.900,00	(106.100,00)	-	203.000.000,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	437.560.763,00	437.555.518,00	-	437.555.518,00	(5.245,00)	-	-	437.560.763,00
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	29.994.779,00	1 Paket	29.994.779,00	(5.221,00)	-	30.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.060.763,00	17.060.763,00	1 Paket	17.060.763,00	-	-	17.060.763,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	77.500.000,00	77.499.976,00	1 Paket	77.499.976,00	(24,00)	-	77.500.000,00	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10 Dokumen	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	12 Laporan	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	226.018.927,00	676.018.927,00	-	676.018.927,00	450.000.000,00	-	226.018.927,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00		1 Unit		(100.000.000,00)	-	100.000.000,00	
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	1 Unit		550.000.000,00	1 Unit	550.000.000,00	550.000.000,00	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12				
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	126.018.927,00	126.018.927,00	1 Unit	126.018.927,00	-	-	126.018.927,00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.244.100.000,00	20.185.000.000,00	-	20.185.000.000,00	(59.100.000,00)	-	20.244.100.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	186.000.000,00	186.000.000,00	1 Laporan	186.000.000,00	-	-	186.000.000,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.058.100.000,00	19.999.000.000,00	1 Laporan	19.999.000.000,00	(59.100.000,00)	-	20.058.100.000,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	709.869.910,00	747.628.897,00	-	747.628.897,00	37.758.987,00	-	709.869.910,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.000.000,00	47.430.000,00	1 Unit	47.430.000,00	13.430.000,00	-	34.000.000,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	455.869.910,00	478.557.552,00	46 Unit	478.557.552,00	22.687.642,00	-	455.869.910,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	1 Unit	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	151.753.745,00	1 Unit	151.753.745,00	1.753.745,00	-	150.000.000,00	
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	49.887.600,00	1 Unit	49.887.600,00	(112.400,00)	-	50.000.000,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	82.696.846.000,00	78.696.846.000,00	-	78.696.846.000,00	(4.000.000.000,00)	-	82.696.846.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	31 Unit Kerja	82.696.846.000,00	78.696.846.000,00	31 Unit Kerja	78.696.846.000,00	(4.000.000.000,00)	-	82.696.846.000,00	
8	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	136.484.543.028,00	139.042.453.855,00	-	125.084.953.855,00	(11.399.589.173,00)	8.886.518.964,00	138.734.543.028,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase fasilitas layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	82 persen	18.619.470.636,00	18.465.841.795,00	82 persen	18.465.841.795,00	(153.628.841,00)	-	20.619.470.636,00	
1	02	02	2.01	0002	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
1	02	02	2.01	0007	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	3.000.000.000,00		2 Unit		(3.000.000.000,00)	-	5.000.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	8.279.685.000,00	8.279.685.000,00	1 Unit	8.279.685.000,00	-	-	8.279.685.000,00	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	179.786.200,00	179.786.200,00	1 Unit	179.786.200,00	-	-	179.786.200,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	7.000.000.000,00	9.666.835.659,00	1 Paket	9.666.835.659,00	2.666.835.659,00	-	7.000.000.000,00	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	159.999.436,00	159.999.436,00	1 Paket	159.999.436,00	-	-	159.999.436,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	82 persen	117.573.073.227,00	120.284.612.895,00	82 persen	106.327.112.895,00	(11.245.960.332,00)	8.886.518.964,00	117.823.073.227,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19592 Orang	1.038.870.000,00	1.038.870.000,00	19592 Orang	1.038.870.000,00	-	-	1.038.870.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12				
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18702 Orang	991.300.000,00	991.300.000,00	18702 Orang	991.300.000,00	-	-	991.300.000,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17811 Orang	372.000.000,00	372.000.000,00	17811 Orang	372.000.000,00	-	-	372.000.000,00	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86512 Orang	142.499.863,00	142.499.863,00	86512 Orang	142.499.863,00	-	-	142.499.863,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155442 Orang	1.064.500.000,00	1.064.500.000,00	155442 Orang	1.064.500.000,00	-	-	1.064.500.000,00	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754465 Orang	149.999.746,00	149.999.746,00	754465 Orang	149.999.746,00	-	-	149.999.746,00	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92994 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	92994 Orang	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200001 Orang	100.000.000,00	99.999.887,00	200001 Orang	99.999.887,00	(113,00)	-	100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18644 Orang	1.262.506.060,00	1.812.506.060,00	18644 Orang	1.812.506.060,00	550.000.000,00	-	1.812.506.060,00		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1882 Orang	149.999.584,00	149.999.584,00	1882 Orang	149.999.584,00	-	-	149.999.584,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23474 Orang	1.550.000.000,00	3.502.760.000,00	23474 Orang	3.502.760.000,00	1.952.760.000,00	-	1.550.000.000,00		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28060 Orang	400.000.000,00	407.300.000,00	28060 Orang	407.300.000,00	7.300.000,00	-	100.000.000,00		
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	952.286.000,00	952.286.000,00	1 Dokumen	952.286.000,00	-	-	952.286.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	7.966.517.000,00	1 Dokumen	7.966.517.000,00	7.716.517.000,00	2.966.517.000,00	250.000.000,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.707,00	1 Dokumen	99.999.707,00	(293,00)	-	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	250.000.000,00	908.475.000,00	1 Dokumen	908.475.000,00	658.475.000,00	-	250.000.000,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	823.644.600,00	1 Dokumen	823.644.600,00	623.644.600,00	-	200.000.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000,00	1.552.379.097,00	1 Dokumen	1.552.379.097,00	1.252.379.097,00	-	300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1851 Orang	100.000.000,00	99.999.957,00	1851 Orang	99.999.957,00	(43,00)	-	100.000.000,00		
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1851 Orang	100.000.000,00	40.500.000,00	1851 Orang	40.500.000,00	(59.500.000,00)	-	100.000.000,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	300.000.000,00	7.104.464.036,00	1 Dokumen	7.104.464.036,00	6.804.464.036,00	2.104.464.036,00	300.000.000,00		
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	70.526.927.037,00	49.310.091.378,00	1 Dokumen	49.310.091.378,00	(21.216.835.659,00)	-	70.526.927.037,00		
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	100.000.000,00	90.200.000,00	1 Paket	90.200.000,00	(9.800.000,00)	-	100.000.000,00		
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat										
						1 Dokumen		99.999.835,00	1 Dokumen	99.999.835,00	99.999.835,00	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	10 = (9-6)	11 = (9-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.250.000.000,00	6.011.467.000,00	1 Dokumen	6.011.467.000,00	761.467.000,00	-	5.250.000.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	30.878.828.900,00	31.075.532.900,00	1 Dokumen	17.118.032.900,00	(13.760.796.000,00)	-	30.878.828.900,00	
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		12 Unit		74.998.419,00	12 Unit	74.998.419,00	74.998.419,00	-		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	100.000.000,00	116.900.000,00	1 Laporan	116.900.000,00	16.900.000,00	-	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	100.000.000,00	124.999.802,00	1 Dokumen	124.999.802,00	24.999.802,00	-	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	143.356.037,00	384.300.000,00	80 Orang	384.300.000,00	240.943.963,00	-	143.356.037,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	100.000.000,00	195.700.000,00	70 Orang	195.700.000,00	95.700.000,00	-	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	100.000.000,00	84.913.024,00	30 Orang	84.913.024,00	(15.086.976,00)	-	100.000.000,00	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	300.000.000,00	951.500.000,00	1 Dokumen	951.500.000,00	651.500.000,00	-	300.000.000,00	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	50.000.000,00	2.334.010.000,00	1 Dokumen	2.334.010.000,00	2.284.010.000,00	-	50.000.000,00	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	"Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	80 persen	291.999.165,00	291.999.165,00	80 persen	291.999.165,00	-	-	291.999.165,00	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	291.999.165,00	291.999.165,00	1 Dokumen	291.999.165,00	-	-	291.999.165,00	
9	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	550.000.000,00	1.824.223.761,00	-	1.824.223.761,00	1.274.223.761,00	-	550.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota "	82 persen	250.000.000,00	313.354.820,00	82 persen	313.354.820,00	63.354.820,00	-	250.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	2.02	0002			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	2.02	0002	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	100.000.000,00	99.999.820,00	50 Orang	99.999.820,00	(180,00)	-	100.000.000,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000,00	213.355.000,00	1 Dokumen	213.355.000,00	63.355.000,00	-	150.000.000,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		"Persentase SDM kesehatan berkualitas dalam layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota"	82 persen	300.000.000,00	1.510.868.941,00	82 persen	1.510.868.941,00	1.210.868.941,00	-	300.000.000,00
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	300.000.000,00	1.510.868.941,00	200 Orang	1.510.868.941,00	1.210.868.941,00	-	300.000.000,00
10	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		-	-	450.000.000,00	333.331.000,00	-	333.331.000,00	(116.669.000,00)	-	450.000.000,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase pengelolaan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optik dan usaha mikro obat tradisional sesuai standar	100 persen	150.000.000,00	63.730.000,00	100 persen	63.730.000,00	(86.270.000,00)	-	150.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	150.000.000,00	63.730.000,00	1 Dokumen	63.730.000,00	(86.270.000,00)	-	150.000.000,00	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga sesuai standar	80 persen	150.000.000,00	85.387.000,00	80 persen	85.387.000,00	(64.613.000,00)	-	150.000.000,00	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	150.000.000,00	85.387.000,00	1 Dokumen	85.387.000,00	(64.613.000,00)	-	150.000.000,00	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya industri rumah tangga sesuai standar	100 persen	150.000.000,00	184.214.000,00	100 persen	184.214.000,00	34.214.000,00	-	150.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			50 Unit	150.000.000,00	184.214.000,00	50 Unit	184.214.000,00	34.214.000,00	-	150.000.000,00
11	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	750.000.000,00	1.003.016.772,00	-	1.003.016.772,00	253.016.772,00	-	750.000.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase terlaksananya upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota "	74 persen	450.000.000,00	501.499.918,00	501.499.918,00	74 persen	501.499.918,00	51.499.918,00	-	450.000.000,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	450.000.000,00	501.499.918,00	1 Dokumen	501.499.918,00	51.499.918,00	-	450.000.000,00
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1 Dokumen	450.000.000,00	501.499.918,00	1 Dokumen	501.499.918,00	51.499.918,00	-	450.000.000,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025		APBD 2024 (DPA SIPD)	Rancangan RKPD Tahun 2025		Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan Rancangan Awal RKPD 2025	Selisih Rancangan RKPD 2025 dengan APBD 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10 = (9-6)	11 = (9-7)	12
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan "	82 persen	150.000.000,00	100.000.000,00	82 persen	100.000.000,00	(50.000.000,00)	-	150.000.000,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	(50.000.000,00)	-	150.000.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya upaya promotif dalam peningkatan informasi kesehatan	82 persen	150.000.000,00	401.516.854,00	82 persen	401.516.854,00	251.516.854,00	-	150.000.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	150.000.000,00	401.516.854,00	1 Dokumen	401.516.854,00	251.516.854,00	-	150.000.000,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan menjawab berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD) yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selain menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA